

# DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA DINAMIKA RANTAI PASOK PANGAN POKOK

Iwan S. Anugrah<sup>1</sup>, Yonas H. Saputra<sup>1</sup>, Bambang Sayaka<sup>1</sup>

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*

*Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111*

*Korespondensi penulis: iwansetiajie@yahoo.com*

## PENDAHULUAN

Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia menyinyalir kelangkaan dan darurat pangan kemungkinan akan terjadi di tengah pandemi Covid-19 (Sibuea 2020). Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari segi sosial, ekonomi, dan kegiatan pangan (Echo-Green 2020). Terkait dengan sektor pangan, FAO dalam dokumen “*Addressing the impacts of Covid-19 in food crises*,” menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sudah secara langsung memengaruhi sistem pangan. Dampaknya akan terlihat pada pasokan dan permintaan pangan dan secara tidak langsung melalui penurunan daya beli, kapasitas untuk memproduksi, dan pendistribusian bahan makanan. Selain sandang dan papan, kebutuhan paling mendasar yang harus diperhatikan adalah masalah pangan (Hirawan dan Verselita 2020).

Ketahanan pangan merupakan pertahanan yang penting dalam melawan Covid-19. Kenyataan tersebut menunjukkan ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan per tanggal 19 Oktober 2020 secara kumulatif kasus terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 365.240 orang, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini dari hari ke hari menunjukan tren peningkatan. Dari sisi protokol kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah dan menekan laju penyebaran virus dengan menetapkan berbagai kebijakan, di

---

<sup>1</sup> Kontributor utama

antaranya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Strategi itu hanya akan efektif sepanjang pangan pokok tersedia untuk rakyat (Andri 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, pangan pokok dan strategis yang dimaksud adalah beras, jagung, daging sapi/kerbau, bawang merah, bawang putih, cabai besar, daging ayam, telur ayam, gula pasir, cabai rawit, dan minyak goreng. Pangan pokok yang tercantum dalam Perpres tersebut sebagian besar dipasok dari produksi dalam negeri. Namun, untuk pemenuhan komoditas bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula pasir, sebagian besar diperoleh melalui impor (Santoso 2020).

Stok sejumlah bahan pangan sudah dipastikan pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, aksesibilitasnya sangat dipengaruhi oleh aspek distribusi dan daya beli warga. Dampak dari penerapan PSBB sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya adalah adanya ketidaklancaran transportasi. Kenaikan harga bahan pangan di sejumlah daerah sekalipun masih tergolong relatif kecil, tetapi tetap berpengaruh terhadap daya beli masyarakat/konsumen. Pemerintah harus mewaspadai bahan kebutuhan dasar ini guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen pangan (Sibuea 2020). Risiko dampak PSBB terhadap pasokan pangan dapat menyebabkan rantai pasokan pangan terganggu karena beberapa produk, bahan atau bahan mentah pangan tidak tersedia atau sulit didapatkan. Secara umum kondisi dan volume penyerapan bahan pangan dari petani oleh para pedagang dan pasar tujuan pasokan di berbagai lokasi juga berkurang dan terbatas,

menyebabkan disrupsi pola rantai pasok pangan mulai dari produsen, distributor, pedagang, hingga konsumen.

Dinamika atau tepatnya disrupsi terhadap rantai pasok komoditas pangan pokok sebagai dampak pandemi Covid-19, tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi menjadi fokus seluruh komponen bangsa, termasuk swasta dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan menganalisis dinamika rantai pasok pangan pokok pada situasi pandemi Covid-19 dan merumuskan alternatif kebijakan untuk menyikapinya.

## METODE

Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, publikasi primer, serta informasi aktual dari berbagai institusi maupun media massa (internet dan cetak). Penulisan naskah *review* ini mencakup komoditas pangan pokok mengacu pada Perpres Nomor 71 Tahun 2015 dan Nomor 48 Tahun 2016, namun untuk penulisan ini difokuskan pada komoditas beras medium (pangan), bawang merah (hortikultura), telur ayam (peternakan), serta gula pasir lokal dan minyak goreng curah (perkebunan).

Data harga komoditas diolah menggunakan regresi linear untuk mengetahui perbedaan rata-rata harga sebelum dan sesudah PSBB, sebagai berikut:

$$Y_i = C_i + D_i + e_i$$

Keterangan:

$Y_i$  = harga komoditas  $i$ ;  $C_i$  = konstanta;  $D_i$  = *dummy* harga komoditas ( $D = 0$  untuk harga komoditas sebelum PSBB;  $D = 1$  untuk harga komoditas setelah PSBB); dan  $e_i$  = galat.

Komoditas ( $i$ ) meliputi 1 = beras; 2 = minyak goreng; 3 = bawang merah; 4 = gula pasir; 5 = telur ayam.

Kurun waktu PSBB: awal Januari sampai minggu ke-2 Maret 2020; setelah PSBB: minggu ke-3 Maret sampai minggu ke-4 September 2020).

Margin pemasaran dihitung sebagai berikut:

$$M = (PE-PB)/PB \times 100\%$$

Keterangan:

M = margin pemasaran (%); PE = harga eceran (Rp/kg atau Rp/liter);  
dan PB = harga pedagang besar (Rp/kg atau Rp/liter).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rantai Pasok Komoditas Pangan Pokok

Rantai Pasok merupakan konsep baru dalam menerapkan sistem logistik yang terintegrasi (Marimin dan Magfiroh 2013). Secara sederhana, rantai pasok dapat diartikan sebagai rentetan peredaran barang/fisik, informasi, serta proses yang dipakai dalam pengiriman produk atau jasa dari lokasi sumber (penyuplai) ke lokasi tujuan (konsumen) (Tobing 2015).

Manajemen rantai pasok mengacu pada pengelolaan seluruh proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Dalam proses ini, konsumen menghadapi produk yang sesuai dengan keinginannya, dan produsen dapat menghasilkan produk dengan kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang tepat (Marimin dan Magfiroh 2013). Dengan demikian, sistem manajemen rantai pasok adalah satu kesatuan sistem pemasaran terpadu yang mencakup keterpaduan produk dan pelaku guna memberikan kepuasan pada pelanggan (Saptana 2018).

Berdasarkan jenis proses produksi dan distribusi produk pertanian, rantai pasok pangan dapat dibedakan atas dua tipe (Zuurbier et al. 1996; Zuurbier 2016), yaitu

1. Rantai pasok produk pangan segar (seperti sayuran segar, bunga, buah-buahan). Biasanya yang termasuk di dalam rantai pasok ini meliputi petani, pengumpul, grosir, importir, dan eksportir, pengecer, dan toko-toko khusus. Pada dasarnya semua tahapan rantai pasok tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, produk dibudidayakan atau diproduksi dari desa. Prosedur pokoknya meliputi penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan khususnya perdagangan produk.

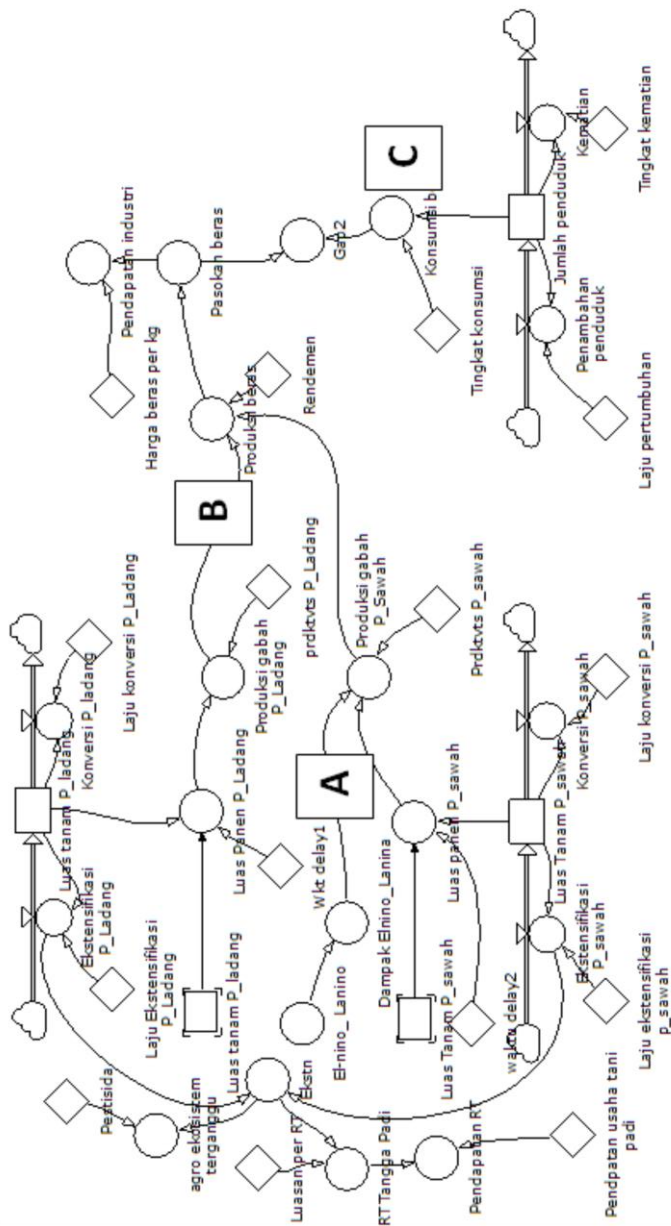
2. Rantai pasok produk pangan olahan (seperti makanan ringan, makanan sajian, produk makanan kaleng). Dalam rantai pasok ini, produk perikanan dan pertanian difungsikan sebagai bahan utama untuk memproduksi berbagai produk pangan dengan nilai ekonomis tinggi. Dalam banyak kasus, umur simpan produk pangan dapat diperpanjang melalui proses pengawetan dan pendinginan produk.

### ***Rantai Pasok Beras***

Rantai pasok beras secara nasional dan dari Provinsi Jawa Barat dicantumkan pada Gambar 1 dan 2. Situasi pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB di wilayah Jabodetabek secara tidak langsung telah memengaruhi kelancaran rantai pasok dari beberapa daerah sentra pemasok beras yang selama ini berperan sebagai penyangga kebutuhan pangan khususnya beras di ibu kota Jakarta. Adanya kelonggaran beberapa kebijakan pembatasan bagi proses distribusi beras, pasokan mulai lancar sekalipun volume pembelian dan penyerapan dari beberapa pasar tujuan masih terbatas serta sirkulasi waktunya lebih lama terjual. Pola rantai pasok tidak banyak berubah dari produsen ke pasar tujuan, kecuali proses serta pola distribusi dari pasar atau retail ke konsumen.

### ***Rantai Pasok Bawang Merah***

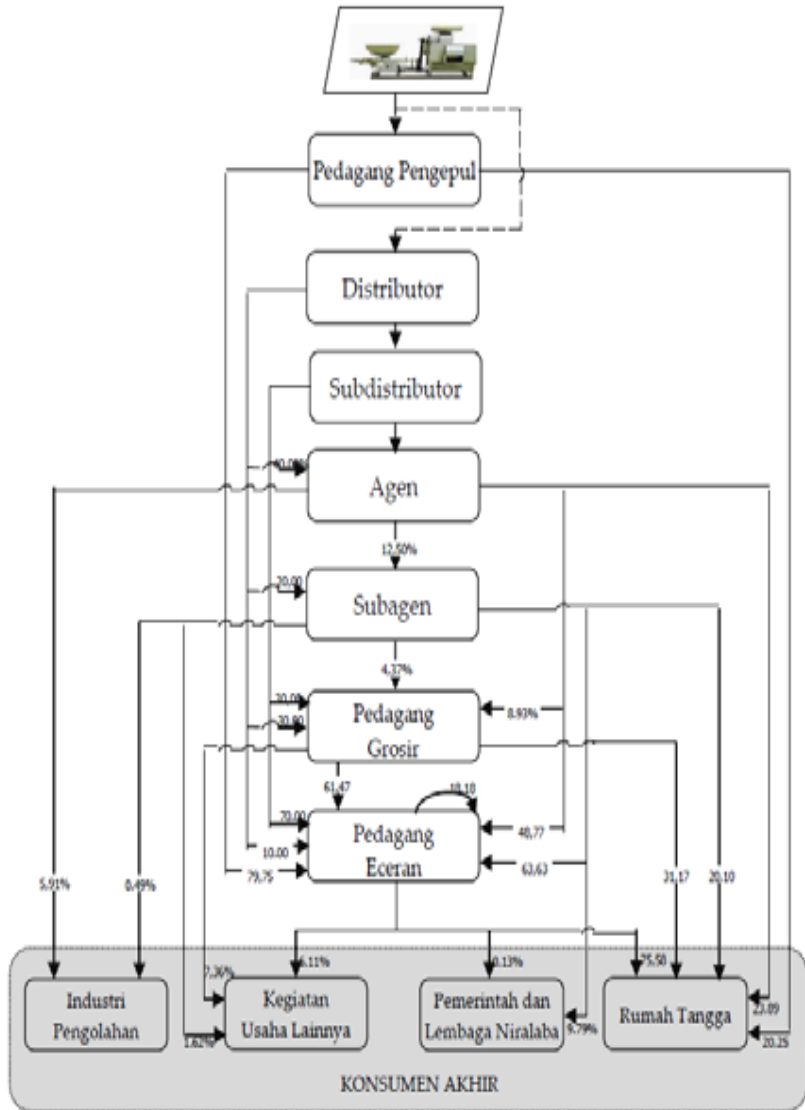
Distribusi bawang merah melibatkan dua pedagang, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola distribusi bawang merah memiliki potensi menjadi lebih panjang jika melewati petani, distributor, subdistributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, pedagang eceran, konsumen akhir atau petani, pedagang pengepul, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, konsumen akhir. Gambar 3 menunjukkan rantai pasok bawang merah. Pemasaran bawang merah mulai dari petani dengan tujuan akhir Pasar Induk Kramat Jati dan didistribusikan kembali ke berbagai pasar eceran atau pasar tradisional hingga ke konsumen akhir.



Sumber: Mahbubi (2013)

Keterangan: A (Pemasok), B (Produsen), dan C (Konsumen)

Gambar 1. Model dinamis *supply chain* beras di Indonesia, 2013

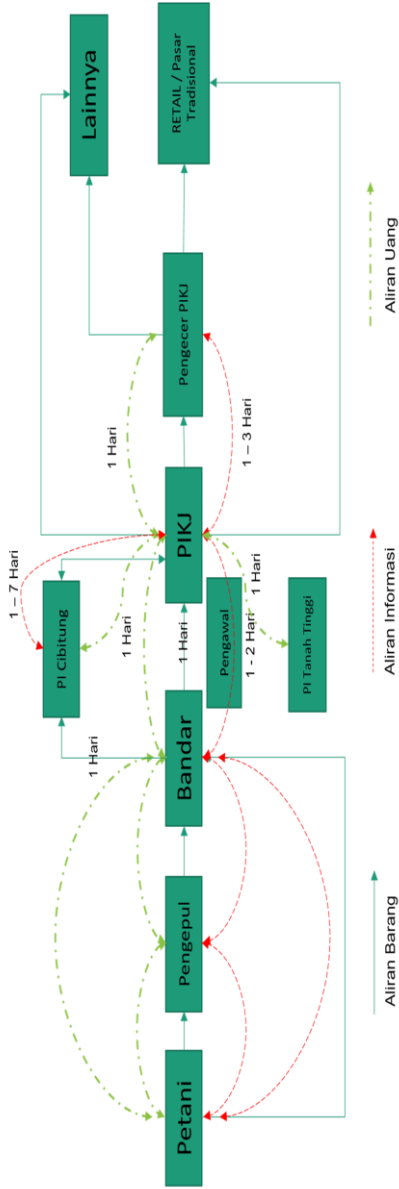


Sumber: BPS (2015)

Gambar 2. Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Jawa Barat, 2015

## AGREGAT SUPPLY DEMAND JABODETABEK

I Produksi Konsumsi | Rantai Pasok | Pola Distribusi I



### Pola Rantai Pasok Cabai dan Bawang Merah PI Kramat Jati

Sumber: Ditjen Hortikultura (2017)

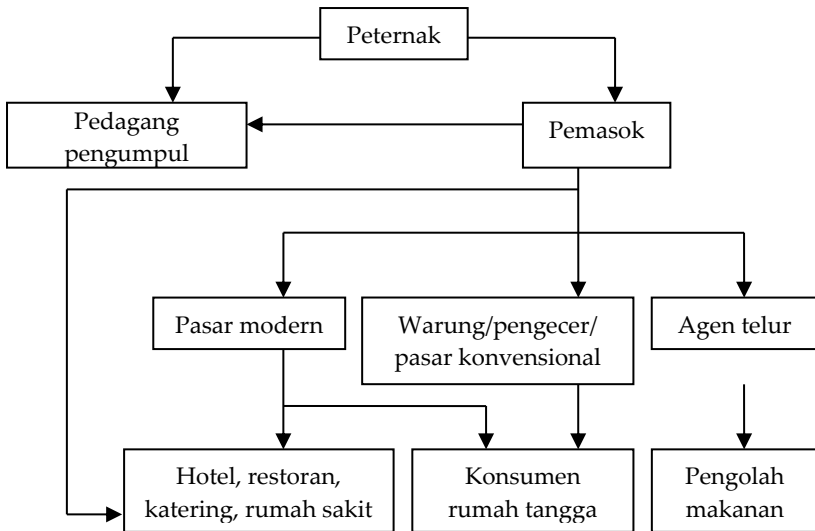
Gambar 3. Kondisi eksisting rantai pasok komoditas aneka cabai dan bawang merah ke Pasar Induk Kramat Jati, 2017



Gambar 4 merupakan rantai pasok bawang merah dari petani di sentra bawang merah Kabupaten Brebes dengan tujuan pasar dan konsumen di wilayah Jabodetabek. Selain orientansi pasar Jabodetabek, rantai pasok bawang merah dari Kabupaten Brebes juga untuk pemenuhan kebutuhan bawang merah antarpulau dan ekspor.

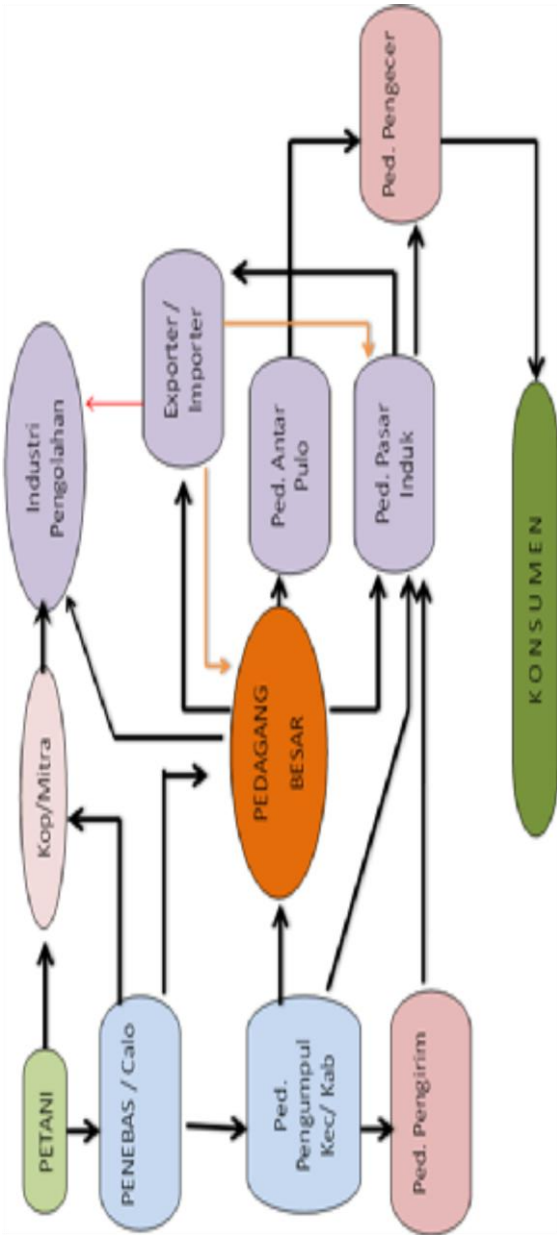
**Rantai Pasok Telur Ayam Ras**

Rantai pasok telur ayam ras berasal dari peternak dibeli oleh pedagang pengumpul dan pemasok dan didistribusikan ke konsumen melalui supermarket, pasar tradisional, maupun agen. Gambar 5 menguraikan rantai pasok telur ayam ras di Jawa Barat. Distribusi dan rantai pasok telur secara umum masih mengikuti pola normal. Volume pemasaran telur dari peternak ke pasar tujuan relatif menurun sehingga para peternak selama masa pandemi Covid-19 harus mencari alternatif pemasaran agar produk telur bisa terjual.



Sumber: Sejati (2011), dimodifikasi

Gambar 5. Ilustrasi pelaku dan rantai pasok telur ayam ras di Jawa Barat, 2011



Sumber: PSEKP (2016)

Gambar 4. Rantai pasokan bawang merah dari Brebes hingga tujuan konsumen Jabodetabek dan antarpulau, 2016

## Dinamika Harga Pangan Pokok

Sebelum kebijakan PSBB diberlakukan, gangguan distribusi pangan telah menyebabkan ketidakstabilan harga. Seminggu sebelum penerapan PSBB diterapkan di Jakarta, pemasokan beras, baik itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami keterlambatan meskipun stok melimpah. Adanya kekhawatiran untuk masuk ke wilayah pusat penyebaran virus atau kekhawatiran truk mereka akan tertahan di Jakarta, menjadi beberapa alasan yang disampaikan terkait gangguan distribusi (Ramadhan 2020).

Harga bahan pokok yang dikumpulkan oleh BPS (2020) melalui *Census and Economic Information Center* (CEIC) menunjukkan adanya peningkatan sejak awal 2020, utamanya pada bulan Maret ketika dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan. Peningkatan terjadi pada harga rata-rata komoditas pangan, seperti beras berkualitas sedang, daging sapi, daging ayam, gula, minyak, dan telur. Analisis data oleh Noor (2020), menunjukkan dinamika harga komoditas pangan pokok sebelum dan saat pandemi Covid-19. Fluktuasi harga terjadi berdasarkan segmentasi periodik. Hasil analisis harga pangan pokok sebelum dan sesudah PSBB secara umum lebih tinggi setelah PSBB (Tabel 1).

Harga pangan pokok yang meningkat secara signifikan setelah PSBB (16 Maret–23 September 2020) meliputi beras, gula pasir, dan bawang merah di Bandung, Jakarta, dan nasional. Harga minyak goreng curah turun signifikan setelah PSBB baik di Bandung, Jakarta, maupun nasional. Harga telur ayam turun signifikan di Jakarta, tetapi relatif tetap di Bandung dan nasional. Peningkatan harga beras, gula pasir, dan bawang merah menunjukkan adanya pengelolaan rantai pasok yang bermasalah setelah penerapan PSBB di berbagai daerah. Harga minyak goreng turun setelah PSBB sebagai dampak berkurangnya permintaan hotel, restoran, maupun katering. Harga telur relatif tetap di tingkat nasional setelah PSBB, tetapi meningkat lagi seiring penurunan suplai yang menyesuaikan permintaan.

Margin pemasaran sebelum dan sesudah PSBB bervariasi antara Jawa Barat dan Jakarta serta pada tingkat nasional (Tabel 2). Margin pemasaran naik untuk komoditas yang dikendalikan secara

Tabel 1. Perubahan harga rata-rata pangan pokok sebelum dan sesudah PSBB, 2020

No.	Komoditas	Bandung		Jakarta		Nasional	
		Sebelum PSBB	Sesudah PSBB	Sebelum PSBB	Sesudah PSBB	Sebelum PSBB	Sesudah PSBB
1.	Beras	11.628	11.900 ***	13.143	13.450 ***	11.843	11.803 ***
2.	Gula pasir	14.214	15.844 ***	15.189	17.129 ***	14.718	16.211 ***
3.	Bawang merah	35.380	43.284 ***	38.810	46.701 ***	38.213	41.612 ***
4.	Minyak goreng	13.147	12.604 ***	13.514	13.478 ***	12.627	12.562 ***
5.	Telur ayam	25.151	24.923 ns	25.285	24.705 *	25.434	25.582 ns

Sumber: Kemendag (2020), diolah

Catatan: harga (Rp/kg) kecuali minyak goreng (Rp/liter)

\*\*\*) berbeda nyata 1%, \*) berbeda nyata 5%, ns = tidak berbeda nyata

Tabel 2. Rata-rata harga dan margin pangan pokok sebelum dan sesudah PSBB, 2020

No.	Provinsi	Komoditas	Harga (Rp/kg) sebelum PSBB		Harga (Rp/kg) sesudah PSBB		Margin (%) sebelum PSBB	Margin (%) sesudah PSBB
			Pedagang eceran (PE)	Pedagang besar (PB)	Pedagang eceran (PE)	Pedagang besar (PB)		
1.	Bandung	Beras	11.628	10.123	11.925	10.088	0,15	0,18
		Gula pasir	14.280	13.282	15.838	14.532	0,08	0,10
		Bawang merah	35.380	26.331	43.284	33.635	0,34	0,28
		Minyak goreng	13.147	11.514	12.267	10.873	0,14	0,13
2.	Jakarta	Telur ayam	25.151	23.088	24.923	22.609	0,09	0,10
		Beras	13.143	10.104	13.477	9.585	0,30	0,41
		Gula pasir	15.248	13.349	17.127	13.689	0,14	0,26
		Bawang merah	38.810	22.087	46.701	32.496	0,77	0,46
3.	Nasional	Minyak goreng	13.514	11.525	13.001	10.575	0,18	0,23
		Telur ayam	25.285	22.290	24.705	22.251	0,13	0,11
		Beras	11.843	10.704	11.866	10.690	0,11	0,11
		Gula pasir	14.770	13.114	16.208	14.079	0,13	0,16
.		Bawang merah	38.213	29.731	41.612	33.179	0,29	0,26
		Minyak goreng	12.627	11.175	12.213	10.745	0,13	0,14
.	.	Telur ayam	25.434	22.774	25.582	22.887	0,12	0,12

Sumber: Kemendag (2020)

Catatan: Harga minyak goreng (Rp/liter)

Margin PE-PB (pedagang eceran terhadap pedagang besar)

monopoli/oligopoli setelah PSBB untuk komoditas beras dan gula pasir di Bandung, margin pemasaran komoditas lainnya turun. Margin pemasaran untuk beras, gula pasir, dan minyak goreng di Jakarta, naik setelah PSBB, sedangkan di tingkat nasional, margin pemasaran yang naik adalah gula pasir dan minyak goreng, margin pemasaran beras tetap, dan komoditas lainnya turun.

## **Langkah Antisipatif Mengatasi Dampak PSBB**

### ***Penerapan PSBB Tingkat Nasional dan Daerah***

Kebijakan PSBB dirumuskan berdasarkan pendekatan hukum dan kepentingan nasional maupun daerah. Pendekatan hukum yang terkait PSBB di Indonesia mengacu pada dua peraturan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang diundangkan pada 31 Maret 2020. Dengan melakukan pengusulan dari gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan, pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diundangkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB tersebut meliputi (1) peliburan sekolah dan tempat kerja; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; (3) pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; (4) pembatasan kegiatan sosial budaya; (5) pembatasan moda transportasi; dan (6) pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Penerapan PSBB di DKI Jakarta telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada 7 April 2020, dan berlaku selama 14 hari (Bayu 2020), dengan berbagai pembatasan sesuai kegiatan protokol kesehatan pandemi Covid-19, di antaranya *sosial distancing*, *work from home* (WFH) dan pembatasan mobilitas penduduk hingga transportasi dari luar daerah DKI Jakarta. Pembatasan ini diperkirakan dapat semakin memperburuk situasi pemenuhan pasokan pangan, mengingat

wilayah Jakarta menjadi tujuan rantai pasok berbagai komoditas pangan pokok.

Dalam penerapan pembatasan wilayah, dampak terhadap pasokan pangan nasional perlu dipertimbangkan. Wilayah Jabodetabek, misalnya, membutuhkan pasokan sayur, antara lain dari Bogor, Bandung, Garut, Pandeglang, Sukabumi, dan Cianjur; telur ayam dari Jawa Timur; daging ayam dari Jawa Barat dan Jawa Tengah; beras dari Jawa Barat dan Jawa Tengah; serta pasokan sapi dari Lampung, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Rantai pasok yang terputus karena sebagian perantara tidak beroperasi perlu segera diatasi (Kurniawan 2020).

Per 1 Mei 2020, lebih dari 10.000 kasus Covid-19 terkonfirmasi telah dilaporkan di Indonesia, kebanyakan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) (BNPB 2020; Kemenkes 2020). Kemudian, pada 21 April 2020, dua puluh wilayah telah mengimplementasikan PSBB di daerah mereka (Debra 2020). Prioritas kesehatan *versus* pemenuhan pangan terjadi cukup jelas di sini. Gugus Tugas Covid-19 menegaskan komitmen mereka akan memudahkan ketersediaan logistik kebutuhan dasar (termasuk pangan). Namun, kekhawatiran akan peningkatan pembatasan operasional dan distribusi meningkat diekspresikan para pemangku kepentingan dari pihak industri (Gugus Tugas Covid-19 2020). Selama jalur distribusi seperti gudang, pelabuhan, bandara, layanan kereta api barang dan truk masih berjalan, logistik cukup aman (Kompas 2020).

Toko retail dapat beroperasi layaknya gudang tanpa adanya pembeli yang datang. Proses transaksi pun dilakukan secara daring, dengan kurirnya adalah pengemudi transportasi daring. Selanjutnya, perlu dikembangkan prosedur yang mencakup proses pengemasan dan pengiriman, dengan potensi penyebaran wabah minimal. Dalam proses pengiriman barang ke pelanggan, interaksi juga harus diminimalkan (Saumi 2020).

Proses pengiriman barang harus memperhatikan keamanan operator pengiriman, baik supir truk maupun pengemudi transportasi daring, dari risiko penularan wabah. Dengan penerapan protokol kesehatan, armada ini dilengkapi dengan persediaan masker, *hand*

*sanitizer*, dan bahan pembersih armada dan barang bawaan. Dengan melakukan sistem pembelian secara daring, potensi penularan wabah terhadap pegawai toko retail diharapkan dapat dikurangi.

### ***Sinergi Kebijakan Antarlembaga pada Masa Pandemi***

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 memberikan panduan mengenai pelaksanaan PSBB oleh pemerintah daerah, termasuk pengaturan pada industri pemrosesan, distribusi, dan retail pangan. Unit-unit produksi tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berdasarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan pembatasan tambahan sebagai penerapan PSBB di wilayah mereka. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah harus menetapkan sanksi dan melakukan inspeksi secara acak untuk bahwa memastikan semua industri dan penyedia jasa transportasi mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah daerah harus mencegah penyebaran wabah dan meminimalisir gangguan terhadap pasok pangan.

Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1056/SE/RC.10/03/2020 tentang strategi dalam pencegahan dan perlindungan Pandemi Covid-19, di antaranya sosialisasi kepada petani dan petugas lapangan. Hal ini untuk pencegahan berkembangnya Covid-19 sesuai standar World Health Organization (WHO) dan pemerintah, dan pembuatan atau pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik, dan pemasaran.

Yusuf et al. (2020) menjabarkan model ekonomi Universitas Pajajaran yang memprediksi bahwa sektor manufaktur dan industri akan terimbas parah oleh pandemi. Namun, sektor pertanian akan terkena dampak paling kecil dibandingkan sektor lain. Pasalnya, meski masih terdapat risiko terganggunya rantai penawaran (*supply chain*) dan penurunan permintaan, namun dampak pembatasan sosial di



sektor pertanian relatif kecil. Relatif elastisnya sektor pertanian juga telah dikonfirmasi oleh proyeksi dari the Economist Intelligence Unit (EIU).

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 memberlakukan adanya larangan melakukan perjalanan darat, laut, dan udara ke dan dari zona merah transmisi Covid-19, khususnya antara 14 April hingga 31 Mei, untuk mencegah arus keluar besar-besaran selama libur Hari Raya Idul Fitri (Kemenhub 2020). Meminimalkan gangguan distribusi pangan antardaerah penting dilakukan agar terhindar dari kelangkaan saat pandemi. Produsen-produsen besar bahan pokok seperti beras, ayam, dan gula terpusat di Jawa. Jawa Tengah dengan total produksi 5,52 juta ton pada tahun 2019 merupakan produsen beras terbesar (BPS 2020). Jawa Timur memproduksi 51,15% gula Indonesia tahun 2018 (BPS 2018). Tahun 2019, Jawa Barat merupakan produsen daging ayam terbesar dengan total produksi 886.752 ton (Kementan 2019).

Menurut Bulog (2020), bahan pokok seperti beras didistribusikan ke Sumatera, Kalimantan, Bali, dan bagian Timur Indonesia. Untuk itu, pelabuhan memainkan peranan penting untuk transportasi antarpulau bagi komoditas-komoditas ini. Saat ini, pasok pangan nasional untuk beras dalam kondisi surplus sekitar 3,5 juta ton cadangan beras, sementara pada Februari hingga Mei volume produksi beras sebanyak 12,4 juta ton. Jika stok tersebut ditambahkan ke Bulog dan penggilingan beras, maka total stok adalah sebesar 15 juta ton beras (Gugus Tugas Covid-19 2020).

Menurut Patunru et al. (2020), Jabodetabek dan daerah penghasil nonpangan lainnya sangat bergantung pada beras dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jika pada titik-titik pemeriksaan di jalan menyebabkan antrean panjang truk, maka kekurangan pasokan akan terjadi meskipun sebenarnya stok mencukupi. Izin mobilitas Kemenperin kembali dapat berguna untuk mempercepat proses pemeriksaan. Pemerintah DKI Jakarta misalnya telah membuat layanan pemesanan daring untuk pasar-pasar tradisional di ibu kota, tetapi tidak memberikan layanan pengantaran langsung ke rumah (PD Pasar Jaya 2020).

## *Perubahan Pola Rantai Pasok Pangan Pokok*

Hirawan dan Verselita (2020) menyampaikan perubahan pola rantai pasok pangan di tengah pandemi Covid-19 akibat kebijakan WFH dan karantina wilayah secara parsial. Selama pandemi Covid-19, mulai dari proses produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir, sistem kerja atau moda industri pangan memang mengalami perubahan besar.

Hal ini mendesak untuk direalisasikan mengingat 93% mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil. Fasilitas dan bantuan sangat dibutuhkan agar mereka terbantu untuk meningkatkan kinerja produksinya dan perlu pengawasan ketat. Dari sisi konsumsi, agar daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19 tetap terjaga, pemerintah memberikan stimulus fiskal sebesar Rp405,1 triliun. Sebanyak Rp110 triliun di antaranya akan dialokasikan dalam bentuk jaring pengaman sosial, termasuk penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu prakerja, diskon tarif listrik (untuk pelanggan 450 dan 900VA), pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar, dan penyesuaian anggaran pendidikan.

Jalur distribusi atau logistik menjadi sangat vital karena beberapa komoditas menjadi sangat penting di tengah pandemi Covid-19, seperti alat-alat kesehatan dan bahan pangan. Protokol logistik dan jalur distribusi logistik di tengah masa pandemi Covid-19 memiliki peran strategis. Masuknya komoditas pangan melalui jalur darat, laut, dan udara menjadi titik-titik yang perlu menjadi perhatian sebelum distribusi komoditas tersebut tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Insentif untuk sektor logistik dalam rantai pasok pangan perlu menjadi prioritas agar distribusi pangan terjamin serta ketersediaan dan stabilitas harga pangan tetap terjaga.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan rantai distribusi pangan Indonesia masih belum efektif dan menjadi faktor utama pendorong harga komoditas di pasar. Setiap produk memiliki rata-rata enam titik distribusi sebelum menjangkau konsumen. Pada saat yang sama, setiap poin memiliki tiap titik mengambil margin yang cukup besar. Sinyalemen KPPU tersebut

tidak jauh dari hasil survei BPS yang dilaksanakan Februari 2020. Survei menunjukkan bahwa rantai perdagangan lima komoditas pangan pokok partisipasi sebelum menjangkau konsumen. Kelima komoditas pangan pokok yang dimaksud adalah beras, jagung pipilan, bawang merah, cabai merah, dan daging ayam ras.

Setiap daerah memiliki karakter berbeda dalam hal rantai perdagangan. Jawa Tengah misalnya, meskipun dikenal sebagai sentra pertanian, namun menjadi daerah dengan rantai distribusi terpanjang untuk tiga komoditas: cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan. Maluku Utara dan Kalimantan Barat masing-masing adalah daerah dengan rantai perdagangan terpendek untuk bawang merah dan daging ayam ras. Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan wilayah dengan rantai perdagangan terpendek untuk tiga komoditas (beras, cabai merah, dan jagung pipilan).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dampak Pandemi Covid 19 telah memengaruhi dinamika situasi pangan secara nasional. Dampak pembatasan mobilitas melalui PSBB dan protokol kesehatan lainnya, mendorong aktivitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok menjadi terbatas. Penerapan PSBB menjadi kendala bagi kegiatan rantai pasok komoditas pangan pokok dan strategis sehingga harga eceran umumnya meningkat. Terganggunya sistem logistik dan distribusi pangan dari produsen ke konsumen, pada kelangkaan pasokan bahan pangan, telah mendorong pada peningkatan harga beberapa komoditas, termasuk meningkatnya margin pemasaran beberapa kebutuhan pokok.

Dampak di tingkat produsen, sekalipun tidak banyak berpengaruh pada proses dan jumlah produksi, namun terjadinya keterbatasan penyerapan produk akibat PSBB dibandingkan seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 ke berbagai pasar tujuan menjadi kendala bagi para petani sebagai produsen. Selain jumlah produk tidak bisa dipasarkan, harga produk menurun dan pada akhirnya para petani mengalami kerugian usaha tani.

## Saran

Perlu penyesuaian dan motivasi untuk menghasilkan berbagai inovasi serta langkah nyata sebagai upaya mengatasi gangguan rantai pasok sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi sejalan dengan itu dilakukan juga oleh seluruh masyarakat. Dalam rantai pasok komoditas pangan pokok, dibutuhkan upaya koordinasi dan sinergi kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19, antara prioritas penanganan kesehatan dan penyediaan kebutuhan pangan. Kementerian Pertanian, Kesehatan, Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah serta lembaga yang terkait disarankan bersinergi dalam menjamin kelancaran kegiatan rantai pasok penyediaan pangan pokok secara nasional maupun antardaerah hingga penanganan antarlembaga lintas kementerian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri KB. 2020 Apr 30. Strategi pertanian menghadapi pandemi Covid 19 [Internet]. [diunduh 2020 Agu 17]. Tersedia dari: <https://mediaindonesia.com/read/detail/308928-strategi-pertanian-menghadapi-pandemi-covid-19>
- Bayu DJ. 2020 Apr 7. Disetujui Menkes, PSBB di DKI Jakarta resmi berlaku selama 14 hari [Internet]. [diunduh 2020 Aug 14]. Tersedia dari: <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5e9a41f6293a8/disetujui-menkes-psbb-di-dki-jakarta-resmi-berlaku-selama-14-hari>.
- [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. Situasi terkini perkembangan novel coronavirus (Covid-19) [Internet]. [diunduh 2020 Sep 13]. Tersedia dari: <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Distribusi perdagangan komoditas beras Indonesia 2015. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik tebu Indonesia 2018. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Harga komoditas pangan bulanan: beras, daging sapi, ayam, gula, minyak goreng, dan telur periode Januari 2018-

- Maret 2020 [Internet]. [diunduh 2020 Sep 13]. Tersedia dari: <https://www.ceicdata.com>
- [Bulog] Badan Urusan Logistik. 2020. Ketersediaan stok beras Perum Bulog jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Makalah dipresentasikan oleh Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi, pada Webinar CIPS tentang Keterjangkauan Beras bagi Masyarakat Prasejahtera di Indonesia.
- Debora Y. 2020 Apr 21. Perkembangan tentang virus corona di Indonesia: daftar 20 wilayah yang terapkan PSBB [Internet]. [diunduh 2020 Sep 14]. Tersedia dari: <https://tirto.id/update-corona-indonesia-daftar-20-wilayah-yang-terapkan-psbb-ePVK>
- Echo-Green. 2020. Panduan cepat penilaian sistem pangan di situasi pandemi dan pasca pandemi Covid-19 di 3 kabupaten sasaran Echo-Green 2020. Jakarta (ID): Echo-Green.
- Gugus Tugas Covid-19. 2020. Stok pangan aman selama Ramadan di tengah pandemi Covid-19 [Internet]. [diunduh 2020 Sep 12]. Tersedia dari: <https://www.covid19.go.id/2020/04/26/stok-pangan-aman-selama-ramadan-di-tengah-pandemi-Covid-19/>
- Hirawan FB, Verselita AA. 2020. Kebijakan pangan di masa pandemi Covid-19. CSIS Commentaries DMRU-048-ID. Jakarta (ID): Centre for Strategic and International Studies.
- [Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2020. Situasi terkini perkembangan novel coronavirus (Covid-19) [Internet]. [diunduh 2020 Sep 12]. Tersedia dari: <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-17-april-2020/#.XpmTvcgzblU>
- [Kemendag] Kementerian Perdagangan. 2020. Sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP) [Internet]. [diunduh 2020 Sep 23]. Tersedia dari: <https://ews.kemendag.go.id/>.
- [Kemenhub] Kementerian Perhubungan. 2020. Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [Internet]. [diunduh 2020 Agu 20]. Tersedia dari: [http://jdih.dephub.go.id/index.php/produk\\_hukum/view/VUUwZ01qVWdWRUZJVlU0Z01qQXlNQTO9](http://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/VUUwZ01qVWdWRUZJVlU0Z01qQXlNQTO9)

- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2019. Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2019 [Internet]. [diunduh 2020 Agu 21]. Tersedia dari: [https://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku\\_Statistik\\_2019.pdf?time1577542043450](https://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2019.pdf?time1577542043450)
- Kompas. 2020 Mar 31. Karantina perlu jaminan logistik. *Harian Kompas. Ekonomi dan Bisnis*:9.
- Kurniawan M. 2020 Mar 31. Jaga rantai pasok tetap hidup [Internet]. [diunduh 2020 Sep 4]. Tersedia dari: <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/03/31/jaga-rantai-pasok-tetap-hidup/>
- Mahbubi A. 2013. Model dinamis *supply chain* beras berkelanjutan dalam upaya ketahanan pangan nasional, *J Manaj Agribis*. 10(2):81-89.
- Marimin, Maghfiroh N. 2013. Teknik dan analisis pengambilan keputusan *fuzzy* dalam manajemen rantai pasok. Bogor (ID): IPB Press.
- Noor TI. 2020. Ketahanan pangan Indonesia: pendekatan multidimensi. Materi presentasi Webinar Kaprodi Magister Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Unpad; 2020 Sep 24; Sumedang, Indonesia.
- Patunru A, Octania G, Audrine P. 2020. Penanganan gangguan rantai pasok pangan di masa pembatasan sosial. Ringkasan Kebijakan. Jakarta (ID): Center for Indonesian Policy Studies.
- PD Pasar Jaya. 2020. Belanja dari rumah [Internet]. [diunduh 2020 Agu 13] Tersedia dari: <http://pasarjaya.co.id/berita/detail/Belanja-Dari-Rumah/>.
- Ramadhan F. (2020). Suplai bahan pangan dari luar jakarta mulai seret [Internet]. [diunduh 2020 Agu 17]. Tersedia dari: <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/03/31/suplai-bahan-pangan-dari-luar-ibukota-mulai-seret/>
- Santoso YI. 2020. Corona jadi pandemi, Kemendag: pasokan 11 komoditas pangan strategis aman [Internet]. [diunduh 2020 Sep 1]. Tersedia dari: <https://nasional.kontan.co.id/news/corona-jadi-pandemi-kemendag-pasokan-11-komoditas-pangan-strategis-aman>
- Saptana. 2018. Manajemen rantai komoditas cabai pada agroekosistem lahan kering di Jawa Timur. *Anal Kebijak Pertan*. 16(1):19-41.
- Saumi A. 2020. Sistem logistik baru dinilai perlu di tengah pandemi Covid-19 [Internet]. [diunduh 2020 Sep 4]. Tersedia dari: <https://www.alinea.id/bisnis/perlu-ada-sistem-logistik-baru-di-tengah-pandemi-Covid-19-b1ZJP9sCc>
- Sejati WK. 2011. Analisis kelembagaan rantai pasok telur ayam ras peternakan rakyat di Jawa Barat. *Anal Kebijak Pertan*. 9(2):183-198

- Sibuea P. 2020. Darurat pangan saat pandemi Covid-19 [Internet]. [diunduh 20 Sep 2020]. Tersedia dari: <https://analisis.kontan.co.id/news/darurat-pangan-saat-pandemi-covid-19>
- Tobing B. 2015. Rantai pasok pangan (*food supply chain*) [Internet]. [diunduh 2020 Sep 20]. Tersedia dari: <https://supplychainindonesia.com/rantai-pasok-pangan-food-supply-chain/>.
- Yusuf AN, Suganda T, Mansur F, Hadisoemarto P. 2020. Strategi ekonomi sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19 [Internet]. [diunduh 2020 Agu 14]. Tersedia dari: <http://sdgcenter.unpad.ac.id/strategi-ekonomi-sektor-pertanian-di-tengah-pandemi-Covid-19/#>
- Zuurbier PJP, Trienekens JH, Ziggers GW. 1996. Vertical cooperation: methods to start partnerships in food industry and agribusiness. Deventer (NL): Kluwer.
- Zuurbier PJP. 2016. Market structure and vertical co-ordination. Wageningen (NL): Wageningen Agricultural University the Netherland.